

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Nurul Alfiani

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: Nurulalfianii13@gmail.com

Abstract

Clean water is water used for daily needs whose quality meets health requirements and can be drunk when it has been cooked. Clean water that is healthy and of good quality and continuously flowing is really needed by the community because it can improve the quality of people's lives. The purpose of this study is to determine the role of the government in providing clean water and the factors that influence the provision of clean water. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation methods. The data obtained were then analyzed through several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results obtained show that the Public Works Office as one of the local government instruments in providing clean water has role indicators, namely (1) planning activities in the field of clean water, (2) implementing activities in the field of clean water, (3) distributing tasks and controlling the implementation of activities in the field of clean water. From these indicators, it is found that the implementation of the role of the Public Works Office is still not optimal. This is based on the condition of the Untia Village area which is located in a coastal area so that the provision of clean water through the drilling system is still difficult to obtain clean water. Based on the analysis of primary and secondary data, the researcher identified several solutions that can encourage the success of clean water supply, namely providing clean water infrastructure in the form of tools or machines that can reduce underground salt levels for coastal areas, collaborating with clean water supply agencies, and making a master plan for clean water supply that is more planned and integrated.

Keywords: Clean Water, Provision, Government Role

Abstrak

Air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih yang sehat dan berkualitas serta kontinu mengalir sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan air bersih dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian, dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih memiliki indikator peran, yaitu (1) perencanaan kegiatan di bidang air bersih, (2) pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih, (3) pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih. Dari beberapa indikator tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan peran Dinas Pekerjaan Umum masih belum optimal. Hal ini didasari kondisi wilayah Kelurahan Untia yang berada di wilayah pesisir sehingga penyediaan air bersih melalui sistem pengeboran masih sulit untuk mendapatkan air bersih. Berdasarkan hasil analisis data primer dan data sekunder, peneliti mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat mendorong keberhasilan penyediaan air bersih, yaitu menyediakan prasarana air bersih berupa alat atau mesin yang dapat mengurangi kadar garam di bawah tanah untuk di daerah pesisir, melakukan kerja sama dengan instansi-instansi penyedia air bersih, dan membuat rencana induk untuk penyediaan air bersih yang lebih terencana dan terpadu.

Kata kunci: Air Bersih, Penyediaan, Peran Pemerintah

PENDAHULUAN

Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) adalah memastikan bahwa masyarakat mencapai akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Program yang dilaksanakan untuk mengimplemetasikan *SDGs* di bidang akses air bersih dan sanitasi adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.

Air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih yang sehat dan berkualitas serta kontinu mengalir sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagi manusia kebutuhan air sangat mutlak karena zat pembentuk tubuh manusia sebagian terdiri dari air yang jumlahnya sekitar 73% dari bagian tubuh. Air di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pengangkut dan pelarut bahan-bahan makanan yang penting bagi tubuh. Sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia berupaya mendapatkan air yang cukup bagi dirinya (Suharyono, 1996).

Sumber daya air merupakan kebutuhan sangat mendasar dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam hal penyediaan air. Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 pasal 33 Ayat (3) yaitu Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini merupakan landasan filosofis untuk menentukan bagaimana pengelolaan sumber daya alam, termasuk air dalam kehidupan bernegara. Sehingga hak utama untuk menikmati

manfaat dari sumber daya air adalah rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan deklarasi *the united nations committee on economic, cultural, and social right* yang menyatakan bahwa air bukan semata-mata komoditas ekonomis, tapi juga komoditas sosial dan budaya sehingga akses terhadap air merupakan hak asasi manusia.

Penyediaan air bersih menjadi perhatian khusus setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Perkembangan kota yang cukup pesat disertai bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan kebutuhan manusia terhadap air bersih juga semakin bertambah dikarenakan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat esensial untuk kelangsungan hidup manusia dalam pemenuhan aktivitas sehari-harinya. Hal tersebut menjadikan kualitas layanan penyedia dan pengelola air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pelayanan air bersih merupakan komponen pelayanan publik yang sangat penting.

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum. Dalam seksi sanitasi dan air bersih Dinas Pekerjaan umum mempunyai tugas melakukan pendataan, pengkajian, pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih pada perumahan dan permukiman rawan air bersih. Hal tersebut merupakan pelayanan dasar yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum daerah kabupaten/kota untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang diprioritaskan pada masyarakat berdomisili pada daerah rawan air bersih

Tingkat kebutuhan air bersih setiap tahunnya bergantung pada pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, maka semakin kompleks juga kebutuhan akan air bersih. Seperti halnya Kota Makassar yang terus berkembang dengan pesat disertai aktivitas

penduduknya yang semakin berkembang sehingga tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih juga semakin meningkat. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi Kota Makassar dikarenakan tingginya permintaan pelayanan air bersih, namun ketersediaan air bersih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga masih terdapat wilayah yang tidak terjangkau air bersih salah satunya yaitu di Kelurahan Untia yang mengalami kekurangan air bersih selama bertahun-tahun.

Kelurahan Untia merupakan salah satu Kelurahan di wilayah Kecamatan Biringkanaya. Luas Kelurahan Untia sebesar 2,89 km² dengan jumlah penduduk 2.589 Jiwa dan terletak pada ketinggian 1meter diatas permukaan laut yang merupakan kawasan pesisir. Kelurahan Untia berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu di sebelah utara, Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya di sebelah timur, Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat.

Kelurahan Untia yang merupakan kawasan pesisir mengalami kekurangan air bersih selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut dikarenakan pengaruh gerakan pasang surut yang mengakibatkan air laut bercampur dengan air tawar sehingga kualitas air di Kelurahan Untia menjadi payau/asin. Serta masuknya industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia yang menggunakan air dengan skala besar dan hanya menggunakan satu aliran perpipaan dengan masyarakat yang berasal dari PDAM. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena kawasan industri tersebut lebih banyak menarik air dibandingkan masyarakat dan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia.

Berdasarkan hasil penelitian Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Sulawesi Selatan

(2020) Kelurahan Untia sebagai wilayah pesisir memiliki sumber daya air yang terbatas hal itu disebabkan oleh intrusi air laut yang menyebabkan kualitas air di wilayah tersebut menjadi asin karena adanya pencampuran unsur air laut dan terganggunya kualitas air tanah akibat sanitasi lingkungan yang buruk dan ditambah dengan privatisasi dan penggunaan air yang dilakukan oleh industri. Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir krisis air bersih di Kelurahan Untia yaitu dengan mengadakan alat filtrasi dengan metode penyaringan yang dapat memisahkan antara garam dan air. Namun, alat tersebut tidak bertahan lama dikarenakan sifatnya yang sensitif serta beratnya kemampuan alat untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kelurahan Untia.

Pada sebuah laman berita online mengabarkan tentang warga Kelurahan Untia yang setiap tahunnya mengalami kesulitan air bersih. Dalam pemberitaan tersebut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Untia, mengatakan sejak kemarau warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih. Hal itu terjadi lantaran PDAM hanya memiliki satu pipa dengan industri dan kualitas dan kualitas sumur gali yang. Masyarakat mengaku miris dengan kehidupan di Kelurahan Untia lantaran kesulitan mendapatkan air bersih. Olehnya itu dalam berita tersebut, kata ibu Jamrud, secara pribadi mengatakan sumber air di Kelurahan Untia sangat mahal untuk mandi, mencuci, minum, dan keperluan lainnya yg menggunakan air semuanya dibeli dengan harga Rp. 80.000 per hari. Menyikapi hal itu, Humas Perusahaan Air Minum Kota Makassar (PDAM), Muhammad Rusli mengaku, sampai saat ini air bersih memang masih sulit sampai di Kelurahan Untia. Namun, ia telah menyiapkan armada tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Serta observasi awal yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa Kelurahan Untia mengalami kekurangan air bersih dikarenakan penggunaan air dengan skala besar yang

dilakukan oleh industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia dan minimnya pelayanan yang mengakibatkan air keran atau air bersih tidak lagi mengalir ke rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat di Kelurahan Untia harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya sebesar Rp.500.000– Rp.800.000 per bulan. Berbagai upaya yang dilakukan seperti pembuatan sumur gali tidak terapkan dengan baik disebabkan pencemaran dari limbah industri dan kualitas air tersebut payau/asin sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu pembuatan sumur bor dan penampungan air yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan kondisi geografis wilayah yang berada di pesisir yang mengakibatkan air yang didapatkan dari hasil pengeboran masih payau. Hal tersebut sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terkait penyediaan air bersih. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan sistem penyediaan air bersih di Kelurahan Untia terindikasi belum terlaksana secara optimal dan belum dapat ditangani secara tuntas dikarenakan minimnya sarana pelayanan air bersih serta buruknya kualitas lingkungan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, serta mengungkapkan fenomena kelangkaan air bersih dan peranan pemerintah dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan

Umum Kota Makassar dan Kelurahan Untia. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi, dan penegasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu amanat bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Kedua kebijakan itu memberi amanat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota bahwa penyelenggaraan penyediaan air bersih merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten karena menyangkut pelayanan prasarana dasar. Artinya, masyarakat di setiap daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap air bersih membutuhkan koordinasi yang memadai dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka pemerintah daerah berperan utama menjamin ketersediaan air bersih. Dengan demikian, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pihak penyelenggara penyedia air bersih, dan masyarakat.

Namun ketersediaan air bersih masih menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Makassar dikarenakan tingginya permintaan akan pelayanan air bersih saat ini belum tertangani dengan baik salah satunya di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Kelurahan Untia yang merupakan kawasan pesisir terletak di wilayah

timur Makassar sering mengalami krisis air bersih serta rendahnya kualitas air sumur gali yang merupakan sumber air utama dari masyarakat Kelurahan Untia.

Oleh karena itu, melihat permasalahan yang terjadi maka perlu ditinjau kembali dengan melakukan penelitian terkait peran pemerintah dalam penyediaan air bersih, yang kemudian menjadi tanggung jawab instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar No 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Bagian Keempat Pasal 14 yaitu Seksi Sanitasi dan Air Bersih, Adapun indikatornya sebagai berikut :

Perencanaan Kegiatan di Bidang Air Bersih

Perencanaan air bersih yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Seksi Air Bersih adalah menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan melakukan pendataan melalui pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data terkait perumahan dan permukiman yang rawan air bersih. Dalam pelaksanaan perencanaan harus memiliki perencanaan yang matang dan telah dipikir secara bersama guna membangun suatu organisasi tersebut sehingga dapat berjalan dan bertahan lama. Begitu pula dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar harus menjalankan perencanaan agar dapat berkembang serta melakukan kegiatan yang telah ditetapkan.

Perencanaan kegiatan di bidang air bersih sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan melakukan penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, serta melakukan pendataan wilayah yang terlayani air bersih. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang air bersih melalui penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran kegiatan, serta pendataan terkait wilayah yang rawan air

bersih. Seperti yang diketahui proses perencanaan di bidang air bersih juga ditujukan untuk kepentingan masyarakat dengan menindaklanjuti surat-surat permohonan dari masyarakat atau pemerintah setempat untuk dibangun sarana air bersih di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.

Kegiatan di Bidang Air Bersih

Pelaksanaan kegiatan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan melaksanakan pembangunan baru dan pemeliharaan serta peningkatan penyediaan prasarana air bersih pada kawasan perumahan dan permukiman rawan air bersih melalui program jaringan perpipaan, instalasi pengelolaan air bersih, hidran umum dan pengelolaan sumber air bersih lainnya.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan kegiatan di bidang air bersih sudah dilakukan di Kelurahan Untia tetapi masih perlu ditindaklanjuti terkait pembangunan sarana di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan, oleh Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bahwa sarana air bersih di Kelurahan Untia tidak berjalan maksimal karena berada di wilayah pesisir sehingga air yang dihasilkan dari sistem pengeboran masih asin dan juga disampaikan oleh masyarakat bahwa pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum di Kelurahan Untia sudah dilaksanakan melalui pembangunan prasarana akan tetapi sistem pengeboran yang dilakukan masih susah untuk mendapatkan air bersih sehingga hasilnya tidak maksimal.

Terkait indikator ini, peneliti melihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar masih belum maksimal dalam melakukan kegiatan di bidang air bersih melalui pembangunan prasarana. Hasil dari analisis tersebut didasari

oleh hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dari masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga mengacu dari berbagai sudut pandang.

Pembagian Tugas dan Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Air Bersih

Pembagian tugas merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kualitas yang baik dari suatu pekerjaan. Pembagian tugas yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan melaksanakan koordinasi melalui instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pemanfaatan air bersih. Adapun upaya dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan air bersih dengan melakukan pengawasan, pengaturan/pemanfaatan dan pelayanan air bersih pada perumahan dan kawasan permukiman yang rawan air bersih.

Pembagian tugas yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah dilakukan melalui koordinasi antara pihak BPSPAM dan PDAM Kota Makassar. Hal ini didasari dari hasil wawancara bersama Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang menyampaikan bahwa, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak BPSPAM dan PDAM Kota Makassar untuk melaksanakan kegiatan di bidang air bersih. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar juga sudah menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih.

KESIMPULAN

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan perannya dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengorganisasian dan pengawasan kegiatan di bidang air bersih. Namun demikian, tingkat keberhasilan pelaksanaan

peran tersebut masih bervariasi pada setiap aspek yang diteliti.

Pada aspek perencanaan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan berbagai tahapan perencanaan secara sistematis, meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, serta pendataan wilayah yang mengalami kerawanan air bersih. Perencanaan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan penyediaan air bersih yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Pada aspek pelaksanaan, upaya penyediaan air bersih melalui pembangunan sarana dan prasarana telah dilakukan, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Kondisi geografis Kelurahan Untia yang berada di kawasan pesisir menjadi kendala utama karena sumber air tanah yang diperoleh melalui pengeboran masih mengandung kadar garam yang tinggi sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber air bersih bagi masyarakat.

Sementara itu, pada aspek pembagian tugas dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM) dan PDAM Kota Makassar dalam mendukung penyediaan air bersih. Selain itu, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program juga telah dilaksanakan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Untia telah berjalan cukup baik, khususnya pada aspek perencanaan dan koordinasi. Namun, pada aspek pelaksanaan masih diperlukan inovasi dan strategi yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah pesisir agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara lebih optimal dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ulya, F. (2019). Upaya Pemerintah Kota dalam Mengatasi Krisis Air Bersih di Kota Balikpapan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ari, M. (2021). Upaya Pemerintahan Daerah dalam Menyediakan Layanan Air Bersih di Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dorojati, R., Astuti, N. D., & Hartono. (2016). Model pelayanan air bersih perdesaan. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 29(3), 146–158.
- Hartono. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kornita, E. S. (2020). Strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 166–181.
- Listin, L. S., Uca, & Amal. (2020). Kualitas air tanah untuk kebutuhan air bersih di Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. *Jurnal Environmental Science*, 3(1), 53–60.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novriadhy, D. (2020). Kualitas air bersih dan potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 19(1), 35–44.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.
- Rahman, F. (2018). Teori Pemerintahan. Malang: UB Press.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021–2026.
- Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021–2026.
- Rochmah, S. (2013). Kebijakan Pelayanan: Studi pada Kebijakan Pelayanan Air Bersih. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Suwarma. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Syaifullah, Tamim, M., & Manzilati, A. (2015). Analisis pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian kelangkaan sumber daya air. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1).
- Tamam, B. (2018). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Air Bersih di Pulau Gili Ketapang. Malang: Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Wadu, B. L., Gultom, F. A., & Pantus, F. (2020). Penyediaan air bersih dan sanitasi: Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 80–88.
- Wara, M. Y. B., & Imanuel, J. (2022). Peran pemerintah desa dalam penyediaan air bersih di Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 26–37.
- Website Berita Kota Makassar. (2019). Warga sekitar pabrik butuh air bersih. Diakses dari <https://beritakotamakassar.com> pada 12 Januari 2023.
- Website Berita Kota Makassar. (2021). Warga Untia kekurangan air bersih. Diakses dari <https://beritakotamakassar.com> pada 12

Januari 2023.

Website Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Sulawesi Selatan. (2020). Efektivitas pelayanan air bersih di Kampung Nelayan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya. Diakses pada 12 Januari 2023.

Website Resmi Kota Makassar. (2023). Profil Kota Makassar. Diakses dari <https://makassarkota.go.id> pada 20 Mei 2023.

Yahya, L. D. N., Fatimawati, S., & Gintulangi, O. S. (2019). Studi penyediaan air bersih di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. *RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa, dan Teknologi*, 7(2), 136–152.